



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2019

BAGIAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberi rahmat dan karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Kerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2017 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Rencana Kerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018 adalah implementasi dari amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Penyusunan Renja ini sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2014-2019, Rencana Kerja SKPD (Renja) adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis yang menjabarkann visi, misi dan program Kepala Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi.

Rencana Kerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto pada hakikatnya adalah merupakan komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui proses dan pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus menerus), dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan di masa depan.

Rencana Kerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto ini semoga dapat dijadikan sebagai arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi semua Pegawai di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto di dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya masing-masing.

Mojokerto, Maret 2019
KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN



Ir. AGOES HERI SANTOSO
Pembina Tk. I
NIP. 19620805 199309 1 009

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	2
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TH 2017	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Th. 2018 dan Capaian Renstra SKPD	4
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	8
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraa Tugas dan Fungsi SKPD	11
2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah	11
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	14
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	16
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD.....	17
3.3. Program dan Kegiatan	17
BAB IV PENUTUP	
Penutup.....	24

LAMPIRAN :

- Lampiran 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
 Dan Prakiraan Maju Tahun 2020

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Th. 2018 Kota Mojokerto.....	5
Tabel 2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto.....	9
Tabel 3	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2019 Kota Mojokerto.....	12
Tabel 4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019 Kota Mojokerto.....	15
Tabel 5	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2019 Kota Mojokerto.....	22
Tabel 6	Tabel Perbandingan Pagu Anggaran Th. 2018 dan Th. 2019.	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2018. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa setiap SKPD berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) SKPD dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Bagian Administrasi Pembangunan tahun 2014-2019 dan tidak menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kota Mojokerto Tahun 2014 – 2019. Rencana Kerja (Renja) SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kerja SKPD merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto Tahun 2019 adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang P Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2006-2008;
12. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mojokerto Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2009-2014.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan disusunnya Rencana Kerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Maksud penyusunan Rencana Kerja 2019 adalah untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dengan pengalokasia anggaran secara efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Sekretariat Daerah yang menunjang visi dan misi Pemerintah Kota Mojokerto

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renja 2019 ini adalah menciptakan dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan selama tahun 2019 serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dokumen Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 dan capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
- 2.4. Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 dan Capaian Renstra SKPD

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, hal ini adalah sebagai tolak ukur capaian kinerja pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto. Mengingat tugas pokok dan fungsi Bagian Pembangunan adalah pengumpulan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan, pengendalian administrasi pembangunan, pengolahan data, pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan dan menyiapkan bahan penyusunan pedoman petunjuk teknis pembinaan dan usaha-usaha peningkatan sarana prasarana pengembangan budaya dan pariwisata di Kota Mojokerto maka dalam melaksanakan kegiatan tersebut Bagian Pembangunan selalu berkoordinasi dengan SKPD dan pihak-pihak lain yang terkait dengan kegiatan tersebut.

Dalam penyusunan Renja 2019 tidak terlepas dari evaluasi terhadap program/kegiatan dan penggunaan anggaran di tahun 2018. Evaluasi Renja 2018 terhadap program/kegiatan, sasaran, indikator kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap Renstra, target kinerja, anggaran Renja Sekretariat Daerah, realisasi kinerja dan realisasi anggaran pada tahun anggaran 2018 adalah seperti tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2018
Kota Mojokerto

Nama SKPD : Bagian Pembangunan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) /Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2014-2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun lalu (2017)			Target program dan kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan (2018)				
					Target Renja SKPD Tahun (2017)	Realisasi Renja SKPD Tahun (2017)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2018)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	Urusan Wajib												
1	06	Bidang urusan Perencanaan Pembangunan											
1	06	15	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya kualitas transparansi daerah									
1	06	15	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (LkjIP)	Persentase kesesuaian LkjIP dengan ketentuan	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	5 dokumen	100
			09	Penyusunan RENJA dan RKA SKPD	Persentase kesesuaian RENJA dan RKA SKPD dengan ketentuan	10 dokumen	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	100	2 dokumen	10 dokumen	100
			10	Penyusunan profile SKPD	Persentase kesesuaian profil SKPD dengan ketentuan	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	0 dokumen	4 dokumen	80
			12	Penyusunan SOP SKPD	Persentase kesesuaian SOP SKPD dengan ketentuan	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	0 dokumen	4 dokumen	80

1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)			
1	20			Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian									
1	20	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran								
1	20	01	01	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terbayarnya uang lembur pegawai	1200 jam	240 jam	240 jam	100	100	240 jam	1200 jam	100
1	20	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas yang memadai	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	60 bulan	100
1	20	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terbayarnya honor pengelola keuangan	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	60 bulan	100
1	20	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpeliharanya peralatan kerja	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	60 bulan	100
1	20	01	10	Penyediaan Alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	60 bulan	100
1	20	01	16	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor	60 bulan	36 bulan	0 bulan	0 bulan	100	12 bulan	60 bulan	100
1	20	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya efisiensi dan tertib administrasi kegiatan								
1	20	17	12	Penyusunan sistim informasi keuangan daerah	Terlaksananya operasional ULP	60 bulan	36 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	60 bulan	100
1	20	17	29	Penyusunan sistim informasi pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya buku petunjuk teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	5 dokumen	100

1	20	17	31	Monitoring, evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran	Tersusunnya laporan Evaluasi Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Tim dan	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	5 dokumen	100
1	20	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Meningkatnya tertib administrasi kegiatan								
1	20	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Tersusunnya laporan monitoring pelaksanaan kegiatan dan	5 dokumen	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	5 dokumen	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto tentang rincian Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota dan Staf Ahli Kota Mojokerto bahwa tugas pokok dan fungsi Bagian Pembangunan pada intinya adalah pengumpulan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan, pengendalian administrasi pembangunan, pengolahan data, pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan dan menyusun pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kota Mojokerto dalam pelaksanaannya Bagian Pembangunan bekerjasama/berkoordinasi dengan SKPD dan pihak-pihak lain yang terkait.

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto tahun 2019 maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolak ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan dalam renstra Sekretariat Daerah Kota Mojokerto. Adapun tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bagian Pembangunan
Kota Mojokerto

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2016 (thn n-2)	Tahun 2017 (thn n-1)	Tahun 2018 (thn n)	Tahun 2019 (thn n+1)	Tahun 2016 (thn n-2)	Tahun 2017 (TW I) (thn n-1)	Tahun 2018 (thn n)	Tahun 2019 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase kesesuaian Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan ketentuan			40%	60%	80%	100%	40%	25%	80%	100%	
2	Persentase kesesuaian Renja dan RKA SKPD dengan ketentuan			40%	60%	80%	100%	40%	25%	80%	100%	
3	Persentase kesesuaian profil SKPD dengan ketentuan			40%	60%	80%	100%	40%	25%	80%	100%	
4	Persentase kesesuaian SOP SKPD dengan ketentuan			40%	60%	80%	100%	40%	25%	80%	100%	
5	Terbayarnya uang lembur pegawai			40%	60%	80%	100%	40%	25%	80%	100%	
6	Tersedianya kendaraan dinas yang memadai			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
7	Terbayarnya honor pengelola keuangan			40%	60%	80%	100%	40%	25%	80%	100%	
8	Terpeliharanya peralatan kerja			40%	60%	80%	100%	40%	25%	80%	100%	
9	Tersedianya alat tulis kantor			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
10	Tersedianya bahan dan peralatan kebersihan kantor			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
11	Terlaksananya operasional ULP			40%	60%	80%	100%	40%	25%	80%	100%	

12	Tersusunnya buku petunjuk teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan			40%	60%	80%	100%	40%	25%	80%	100%	
13	Tersusunnya laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA)			40%	60%	80%	100%	40%	25%	80%	100%	
14	Tersusunnya laporan dan monitoring pelaksanaan kegiatan			40%	60%	80%	100%	40%	25%	80%	100%	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam pelaksanaan tugas, masih dijumpai adanya beberapa isu-isu kerja yang menjadi hambatan dan tantangan, yaitu :

- 1) Lambannya pengajuan dokumen paket pengadaan barang/jasa dari OPD-OPD ke Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Mojokerto (ULP);
- 2) OPD tidak segera mengupload RUP setelah KUAPPAS disahkan;
- 3) Jaringan internet/akses internet lambat dan adanya kerusakan Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
- 4) Laporan bulanan yang disampaikan tidak sesuai dengan buku petunjuk teknis (Peraturan Walikota);
- 5) Upload data laporan melalui aplikasi tidak tepat waktu sesuai dengan buku petunjuk teknis (Peraturan Walikota)

2.4 Review Terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Pencapaian program/kegiatan terhadap rancangan awal RKPD sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan dari Bagian Administrasi Pembangunan. Setiap program/kegiatan yang dilaksanakan selalu dievaluasi apakah program/kegiatan yang dilaksanakan tersebut sudah sesuai dengan tujuan dan sasaran. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto dari tahun ke tahun kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan tidak mengalami perubahan hal tersebut dikarenakan Bagian Pembangunan berperan sebagai supporting staf. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto tahun 2019 guna mendukung target dan sasaran pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kota Mojokerto

Nama SKPD : Bagian Pembangunan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Urusan Wajib	Kota Mojokerto				Urusan Wajib	Kota Mojokerto				
	Bidang urusan Perencanaan Pembangunan	Kota Mojokerto				Bidang urusan Perencanaan Pembangunan	Kota Mojokerto				
	Program Pengembangan data/informasi	Kota Mojokerto	Meningkatnya kualitas transparansi daerah	90%		Program Pengembangan data/informasi	Kota Mojokerto	Meningkatnya kualitas transparansi daerah	90%		
	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Mojokerto	Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	90%	5.000.000	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kota Mojokerto	Persentase laporan kinerja SKPD yang diselesaikan tepat waktu	90%	1.460.450	
	Penyusunan SOP SKPD	Kota Mojokerto	Tersusunnya SOP SKPD	90%	5.000.000	Penyusunan SOP SKPD	Kota Mojokerto	Persentase Penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD	0 %	0	
	Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian					
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Mojokerto	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100%		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kota Mojokerto	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	100%		
	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Mojokerto	Terbayarnya uang lembur pegawai	100%	35,838,000	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Mojokerto	Persentase uang lembur pegawai yang terbayar tepat waktu	0 %	0	
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Mojokerto	Tersedianya kendaraan dinas yang memadai	100%	33,900,000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Kota Mojokerto	Persentase Kendaraan Dinas/Operasional yang dirawat secara berkala dan mempunyai surat yang sah	90%	39.886.000	

	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Mojokerto	Terbayarnya honor pengelola keuangan	100%	108.384.000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Kota Mojokerto	Persentase dapat dibayarkan honor pengelola keuangan dg tepat waktu	90%	73.940.000	
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Mojokerto	Terpeliharanya peralatan kerja	100%	20.500.000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Kota Mojokerto	Persentase pemanfaatan peralatan kerja kantor secara optimal	85%	15.620.000	
	Penyediaan Alat tulis kantor	Kota Mojokerto	Tersedianya alat tulis kantor	100%	35.455.800	Penyediaan Alat tulis kantor	Kota Mojokerto	Persentase kecukupan ATK untuk pelaksanaan kegiatan	90%	20.706.900	
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Mojokerto	Meningkatnya efisiensi dan tertib administrasi kegiatan	100%		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Mojokerto	Meningkatnya efisiensi dan tertib administrasi kegiatan	100%		
	Penyusunan sistim informasi pengelolaan keuangan daerah	Kota Mojokerto	Tersusunnya buku petunjuk teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan 2020	1 dokumen	178.770.000	Penyusunan sistim informasi pengelolaan keuangan daerah	Kota Mojokerto	Jumlah buku petunjuk teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan yang tersusun	1 dokumen	127.733.650	
	Monitoring, evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran	Kota Mojokerto	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) di Pemkot Mojokerto	12 dokumen	366.154.600	Monitoring, evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran	Kota Mojokerto	Jumlah Dokumen (laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA)) yang dilaporkan	12 dokumen	251.763.200	
	Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Mojokerto	Terpenuhinya operasional ULP	95%	751.723.000	Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Mojokerto	Persentase proses pengadaan barang/jasa yang diselesaikan oleh ULP	100%	458.309.300	
	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kota Mojokerto	Meningkatnya tertib administrasi kegiatan	100%		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Kota Mojokerto	Meningkatnya tertib administrasi kegiatan	100%		
	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Kota Mojokerto	Tersusunnya laporan dan monitoring pelaksanaan kegiatan	100%	31.307.000	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Kota Mojokerto	Tersusunnya laporan dan monitoring pelaksanaan kegiatan	0%	0	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja SKPD. Penyusunan rancangan renja dibahas dalam forum SKPD berkoordinasi dengan Bappeko. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tupoksi SKPD. Bagian Pembangunan tidak terdapat usulan Musrenbang hal tersebut dikarenakan Bagian Pembangunan berperan sebagai supporting staf.

Tabel 4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2019
Kota Mojokerto

Nama SKPD : Bagian Administrasi Pembangunan

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

NIHIL

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Pemerintahan Daerah diberikan kebijakan dan kewenang Otonomi Daerah yang luas dan nyata serta bertanggungjawab kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah telah menyerahkan urusan pemerintahan tertentu kepada daerah sehingga menjadi otonomi daerah. Dalam mengelola urusan pemerintahan yang menjadi otonominya, daerah tentu membutuhkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta biaya. Sebagaimana diketahui kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan APBD setiap daerah tidak sama, sehingga dalam mengelola otonomi daerahnya ada keterbatasan dan kendala.

Sebagai unsur Unit kerja dari Sekretariat Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Mojokerto, Bagian Pembangunan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam pengumpulan bahan kebijakan, program dan petunjuk teknis, penghimpunan, pengolahan data dan mengkoordinasikan serta mengevaluasi kegiatan di bidang administrasi pembangunan dan menyusun pedoman dan petunjuk pengelolaan keuangan daerah pemerintah Kota Mojokerto.

Sebagaimana dijelaskan, bahwa tujuan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah adalah berpijak pada pencapaian misi, maka untuk mencapai sasaran tersebut Bagian Pembangunan harus melaksanakan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan dalam organisasi lingkup Pemerintah Kabupaten, sehingga kinerjanya meskipun bermacam-macam, tetapi tetap pada misi dan visinya. Tujuan ini juga mengisyaratkan tentang program jangka panjang, yakni lebih dari satu tahun, sebab dalam pelaksanaan program kerja itu dibutuhkan adanya keahlian akurasi (ketepatan) dalam mengolah dan menyajikan data administrasi, tujuan ini nantinya juga menjadi arahan perjalanan Unit Kerja yang dibawahinya.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD

Perumusan tujuan dan sasaran kinerja Bagian Pembangunan mengalami perubahan, karena sejak Juni 2015 telah berdiri Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mojokerto yang akan mengambil alih semua kegiatan kepariwisataan yang semula dibawah kendali Bagian Pembangunan. Tujuan Bagian Pembangunan yang terkait erat dengan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Terlaksananya administrasi pembangunan yang tertib dan terkendali ;
2. Terwujudnya pelaporan pelaksanaan kegiatan dan penyerahan kegiatan yang tepat waktu ;
3. Terwujudnya pengadaan barang/jasa secara transparan dan akuntabel secara elektronik.

Adapun sasaran yang hendak dicapai oleh bagian Pembangunan adalah sebagai berikut :

- 1) Tersedianya buku pedoman dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan dan pengendalian kegiatan, Harga Satuan pokok Kegiatan dan Standart Harga Satuan Barang ;
- 2) Meningkatnya ketertiban pelaporan kegiatan yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah ;
- 3) Terselenggaranya Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.

3.3. Program dan Kegiatan

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal SKPD. Pada Renja 2019, Program Pengembangan Data/Informasi dan Program Perencanaan Pembangunan Daerah dilebur menjadi 1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Sedangkan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang kegiatannya adalah belanja modal, untuk lingkungan Sekretariat Daerah dikelola satu pintu oleh Bagian Umum.

Berikut adalah rangkaian program dan kegiatan yang hendak dilaksanakan sebagai perwujudan tugas pokok dan fungsi pada bagian Pembangunan yaitu :

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan pagu indikatif sebesar : Rp. 154.952.900,- kegiatannya meliputi :
 1. Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan Dinas/Operasional.

2. Penyediaan Jasa administrasi keuangan
3. Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan pagu indikatif sebesar : Rp. 1.460.450,- kegiatannya meliputi :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

3) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan pagu indikatif sebesar : Rp. 837.806.150,- kegiatannya meliputi :

1. Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA)
3. Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa

Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan pada bagian perumusan program dan kegiatan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 5
Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
Kota Mojokerto

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Keg	SKPD Penanggungja wab					
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan										
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			1/2/3	1/2/3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	Urusan Rutin																		
1	20																		
1	20	3	05	1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran														
1	20	3	05	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Prioritas Daerah		Kota Mojokerto	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	90%	Persentase Kendaraan dinas/operasiona l yang dirawat secara berkala dan mempunyai surat yang sah	90%	Kendaraan dinas/operasional yang dirawat dan diurus perizinannya secara berkala	1 kenda raan	39.886.000	43.874.600	Sedang berjalan	Bag. Pembangunan
1	20	3	05	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Prioritas Daerah		Kota Mojokerto	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	100%	Persentase dapat dibayarkan honor pengelola Keuangan dengan tepat waktu	100%	Pengelola Keuangan yang honorariumnya dibayarkan tepat waktu	12 bln	73.940.000	81.334.000	Sedang berjalan	Bag. Pembangunan
1	20	3	05	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Prioritas Daerah		Kota Mojokerto	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	90%	Persentase pemanfaatan peralatan kerja kantor secara optimal	85%	Peralatan kerja kantor yang berfungsi dengan baik	36 unit	15.620.000	17.182.000	Sedang berjalan	Bag. Pembangunan

1	20	3	05	01	10	Penyediaan Alat tulis kantor	Prioritas Daerah	Kota Mojokerto	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	90%	Persentase kecukupan ATK untuk pelaksanaan pekerjaan	90%	ATK yang disediakan untuk kebutuhan kantor	60 macam	20.706.900	22.777.590	Sedang berjalan	Bag. Pembangunan
1	20	3	05	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Prioritas Daerah	Kota Mojokerto	Persentase kecukupan administrasi perkantoran	90%	Persentase bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan	90%	Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	90%	4.800.000	5.280.000	Sedang berjalan	Bag. Pembangunan
1	20	03	05	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	Persentase Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%				
1	20	03	05	06	09	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Prioritas Daerah	Kota Mojokerto	Persentase Penatausahaan keuangan yang mendukung kinerja SKPD	90%	Persentase laporan kinerja SKPD yang diselesaikan	90%	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 dokumen	1.460.000	1.606.000	Sedang berjalan	Bag. Pembangunan
1						Urusan Prioritas												
1	20	03	05	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah												
1	20	03	05	17	29	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Prioritas Daerah	Kota Mojokerto	Persentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah	90%	Jumlah buku petunjuk teknis pengendalian pelaksanaan kegiatan	1 buku	Persentase SKPD yang penyerapan APBD Kota sesuai ketentuan dan tepat waktu	90%	127.733.650	140.507.015	Sedang berjalan	Bag. Pembangunan
1	20	03	05	17	31	Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA)	Prioritas Daerah	Kota Mojokerto	Persentase realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah	90%	Jumlah dokumen laporan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA)	12 Dokumen	Persentase SKPD yang penyerapan APBD Kota sesuai ketentuan dan tepat waktu	90%	251.763.200	276.939.520	Sedang berjalan	Bag. Pembangunan

1	20	03	05	17	35	Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prioritas Daerah		Kota Mojokerto	Persentase paket pengadaan yang selesai tepat waktu	95%	Persentase proses Pengadaan barang/jasa yang diselesaikan oleh ULP	90%	Jumlah paket lelang yang diselesaikan	90 paket	458.309.300	1.374.927.900	Sedang berjalan	Bag. Pembangunan
1	20	03	05	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH													
1	20	03	05	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	Prioritas Daerah		Kota Mojokerto	Persentase Obrik yang diawasi	90%	Jumlah SKPD yang mengirim dokumen laporan hasil monitoring dan pelaporan kegiatan SKPD	54 SKPD	Meningkatnya tertib administrasi kegiatan	100%	31.307.000	46.960.500	Sedang berjalan	Bag. Pembangunan
						Jumlah Total :										994.219.500	1.964.428.625		

Tabel 6
Perbandingan Pagu Anggaran Tahun 2018 dan Tahun 2019
Bagian Pembangunan

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif 2017	Pagu Indikatif 2018	Jenis Keg	SKPD Penanggungjawab
									1/2/3	1/2/3
1						2	12	12	14	15
1						Urusan Rutin				
1	20	3	05	1		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
1	20	3	05	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	39.276.800	39.886.000	Lanjutan	Bagian Pembangunan
1	20	3	05	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	69.290.000	73.940.000	Lanjutan	Bagian Pembangunan
1	20	3	05	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.400.000	15.620.000	Lanjutan	Bagian Pembangunan
1	20	3	05	01	10	Penyediaan Alat tulis kantor	24.301.450	20.706.900	Lanjutan	Bagian Pembangunan
1	20	3	05	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	0	4.800.000	baru	Bagian Pembangunan
1	20	03	05	06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
1	20	03	05	06	01	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1.251.050	1.460.450	Lanjutan	Bagian Pembangunan
1						Urusan Prioritas				
1	20	03	05	17		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah				Bagian Pembangunan
1	20	03	05	17	29	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	145.816.550	127.733.650	Lanjutan	Bagian Pembangunan

1	20	03	05	17	31	Monitoring Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA)	280.570.400	251.763.200	Lanjutan	Bagian Pembangunan
1	20	03	05	17	35	Penyusunan sistim informasi keuangan daerah	571.372.000	458.309.300	Lanjutan	Bagian Pembangunan
1	20	03	05	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				
1	20	03	05	20	03	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	41.015.200	0	Lanjutan	Bagian Pembangunan
						Jumlah Total :	1.188.293.450	994.219.500		

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) merupakan komitmen seluruh personil Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto yang disusun berdasarkan Renstra yang mengacu pada RPJM Kota Mojokerto Tahun 2014-2019. Keberhasilan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kebersamaan, kontribusi dan komitmen yang kuat dari seluruh personil. Rencana Kerja Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto ini, merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2019 merupakan pedoman bagi Bagian Administrasi Pembangunan dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra). Rencana Strategis (Renstra) Bagian Pembangunan Tahun 2014-2019 selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2019.

Terwujudnya program dan kegiatan tersebut tentu tidak lepas dari komponen pendukung antara lain:

1. Ketersediaan anggaran yang mencukupi sesuai dengan kebutuhan kegiatan satuan kerja;
2. Adanya pemahaman manfaat dan fungsi kerjasama dari satuan kerja di lingkup Pemerintah Kota Mojokerto;
3. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dengan kuantitas yang memadai serta berwawasan kedepan;

Demikian Renja ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan Visi dan Misi yang merupakan Program Kerja Walikota dan Wakil Walikota Mojokerto periode 2014-2019.

Mojokerto, Maret 2019

KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN



Ir. AGOES HERI SANTOSO
Pembina Tk. I
NIP. 19620805 199303 1 009